

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama sehingga pemenuhan pangan merupakan bagian hak asasi setiap warga negara (UU RI Nomor 18 Tahun 2012). Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman (PP RI Nomor 17 Tahun 2015).

Pangan merupakan sumber energi bagi tubuh maka dari itu pangan yang dikonsumsi harus dijaga kualitasnya agar gizi yang terkandung dapat digunakan oleh tubuh dengan maksimal dan tidak memberikan dampak negatif dalam tubuh. Pangan yang aman merupakan pangan yang terbebas dari cemaran biologis, fisik maupun kimia yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan fisik maupun psikologis dari manusia (Hariyadi dkk, 2017). Menurut Karsin (2004) pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan. Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Janin dalam kandungan, bayi, balita, anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut membutuhkan makanan yang sesuai dengan syarat gizi untuk mempertahankan hidup, tumbuh dan berkembang, serta mencapai prestasi kerja. Pangan tidak hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, tetapi memiliki peran krusial dalam seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari pertumbuhan fisik hingga pencapaian prestasi.

Menurut Supriyanto (2006), menyatakan bahwa pangan adalah suatu bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh makhluk hidup sebagai upaya dalam memelihara dan juga meningkatkan kualitas serta meningkatkan kuantitas kesehatan. Hidayati (2006), menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber

hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah untuk dikonsumsi oleh manusia yang berupa makanan dan minuman. Makanan dan minuman ini memiliki kriteria atau standar tertentu yang biasa dikenal dengan standarisasi mutu pangan.

Definisi pangan tidak hanya berarti pangan pokok dan jelas tidak hanya berarti beras, melainkan pangan yang terkait dengan berbagai hal lain (Emawati, 2016). Menurut pasal 1 angka (1) UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 bahwa pangan merupakan segala sesuatu hal yang berasal dari sumber air dan hayati, baik yang dikemas secara olahan maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku lainnya yang perlu digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman.

2.1.2 Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan diartikan harus terpenuhinya pangan hingga ditingkat rumah tangga dan perorangan. Mengacu pada sistem ketahanan pangan menyatakan bahwa sistem ketahanan pangan meliputi tiga subsistem, yakni: ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan. Ketiga komponen tersebut digunakan untuk mengukur atau mendapatkan indeks ketahanan pangan. Pengukuran ini penting untuk menilai sejauh mana ketahanan pangan telah tercapai hingga tingkat rumah tangga dan individu.

Menurut Andini (2017), menyatakan bahwa di tingkat nasional ketahanan pangan mencakup penyediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang dengan harga terjangkau oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan. Hal ini dikarenakan basis konsep ketahanan pangan adalah rumah tangga khususnya di wilayah pedesaan. Secara umum, ketahanan pangan didefinisikan sebagai keadaan dimana setiap orang memiliki aksesibilitas fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat hidup produktif dan sehat. Namun, berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015) tentang pangan, ketahanan pangan merupakan kondisi yang dimana terpenuhinya pangan bagi negara hingga dengan perorangan, yang dapat tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Pengertian dan konsep ketahanan pangan berkembang lebih luas lagi, World Food Summit yang dilaksanakan pada tahun 1996 memberikan isyarat tersendiri dalam ketahanan pangan. Ketahanan pangan tercapai bila semua orang secara terus-menerus, baik secara fisik, sosial dan ekonomi mempunyai akses untuk pangan yang memadai/cukup, bergizi dan aman, yang memenuhi kebutuhan pangan mereka dan pilihan makanan untuk hidup secara aktif dan sehat (Badan Ketahanan Pangan, 2009). Ini menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang menyangkut orang banyak dan harus dipenuhi dalam periode waktu yang kontinyu.

Ketahanan pangan memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan tiap individu. Terdapat suatu indeks penilaian yang dapat mengetahui tingkat ketahanan pangan pada suatu wilayah yang disebut dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks ini mencakup berbagai faktor pendukung yang mempengaruhi ketahanan pangan, antara lain ketersediaan, keterjangkauan, dan yang terakhir adalah pemanfaatan pangan (Badan Ketahanan Pangan, 2018).

Menurut Kurniawan dan Wibowo (2017), ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga pada umumnya tidak dijamin oleh faktor ketersediaan pangan, melainkan oleh aspek distribusi dan daya beli. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjamin ketahanan pangan rumah tangga. Menurut Mahela dan Sutanto (2006), untuk mencapai ketahanan pangan mulai dari tingkat rumah tangga hingga nasional diperlukan agribisnis di bidang pangan, terutama bagi golongan yang mengalami kerawanan pangan sementara dan rawan pangan kronis. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Pangan Tahun 2012, keadaan kerawanan pangan adalah keadaan dimana pangan tidak disediakan oleh negara kepada perseorangan. Kondisi kerawanan pangan ini dapat diatasi dengan memperkuat ketahanan pangan.

Di tingkat rumah tangga, Gundersen, Kreider, & Pepper (2011) mengelompokkan tingkat ketahanan pangan sebagai berikut: 1) Ketahanan pangan, yaitu kondisi saat seluruh anggota keluarga di setiap waktu mampu mengakses jumlah pangan yang cukup untuk dapat beraktivitas dengan baik dan menjaga hidup sehat; 2) Ketahanan pangan rendah, yaitu kondisi saat salah satu anggota keluarga merasa tidak yakin atau tidak mampu untuk memperoleh pangan yang cukup karena keterbatasan dana dan sumber daya yang lain; serta 3) Ketahanan pangan yang sangat rendah, yaitu kondisi saat satu atau lebih anggota rumah tangga kelaparan,

setidaknya beberapa waktu sepanjang tahun, karena mereka tidak mampu membeli makanan yang cukup. Kategori (2) dan (3) dapat digolongkan sebagai kondisi ketidakamanan (kerawanan) pangan.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Provinsi terdiri dari 9 (sembilan) indikator kronis yaitu aspek ketersediaan pangan mencakup (1) Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih “beras + jagung + ubi jalar + ubi kayu”. Aspek akses terhadap pangan mencakup (2) Persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan; (3) Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran; (4) Persentase rumah tangga tanpa akses listrik. Aspek pemanfaatan pangan mencakup (5) Rata-rata lama sekolah perempuan diatas 5 tahun; (6) Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih; (7) Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk; (8) Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting); (9) Persentase angka kesakitan. Semenatar tiga indikator transien yaitu (1) Bencana alam yang terkait iklim; (2) Variabilitas curah hujan; (3) Kehilangan produksi.

FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi dimana semua rumah tangga mempunyai akses, baik secara fisik maupun ekonomi, untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga tidak beresiko untuk mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Ketahanan pangan sangat berkaitan dengan kemiskinan, karena masyarakat miskin akan susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut disebabkan karena kemiskinan merupakan kondisi disaat seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kondisi ketahanan pangan dimana seseorang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat dan aktif. Jika seseorang tidak memiliki ketahanan pangan maka akses terbatas dengan kualitas makanan rendah sehingga jumlah makanan yang dikonsumsi tidak cukup sehingga terjadi ketidakpastian mendapatkan makanan (January, 2014).

Banyak masyarakat yang masih belum memahami betapa pentingnya menyediakan pangan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, membangun kapasitas

dan kemandirian masyarakat merupakan tantangan utama dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat rumah tangga (Ediwiwati et al., 2015). Ketahanan pangan mensyaratkan dipenuhinya dua sisi secara simultan, yaitu sisi ketersediaan dan sisi konsumsi dimana kedua sisi tersebut memerlukan sistem distribusi yang efisien dan dapat menjangkau keseluruhan wilayah. Untuk mewujudkan sistem distribusi yang efisien diperlukan kebijakan distribusi yang pada dasarnya ditujukan untuk mengatur setiap komoditas atau barang agar dapat menjangkau seluruh wilayah dan golongan masyarakat. Sistem distribusi yang efisien menjadi prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau (Suryana, 2003).

Langkah yang tepat bagi pemerintah untuk menghadapi situasi seperti ini adalah dengan melakukan analisis ketahanan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan. Untuk menghindari terjadinya kerawanan pangan maka upaya pencegahan dan upaya penanggulangannya harus dilaksanakan secara cepat dan terkelola dengan baik. Kerawanan pangan dapat diatasi dengan melakukan peningkatan ketahanan pangan (Fauzi et al., 2019). Dengan demikian, suatu wilayah dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangan jika adanya peningkatan produksi pangan, distribusi pangan yang lancar serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi pada seluruh masyarakat. Ketiga aspek ini saling terkait dan harus terpenuhi agar suatu wilayah dapat dikatakan berhasil dalam pembangunan ketahanan pangannya. (Rahmawati, 2012).

Menurut Alida (2015), ada dua indikator untuk mengetahui tingkat ketahanan suatu rumah tangga. Faktor-faktor tersebut adalah bagian pendapatan pangan dan tingkat pasokan energi. Besar kecilnya pengeluaran rumah tangga tidak lepas dari tingkat pendapatan. Kondisi negara yang memiliki ketahanan yang terjamin tidak selalu mencerminkan ketahanan pangan rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga justru menjadi indikator terbentuknya ketahanan pangan daerah baik di wilayah atau regional. Ketahanan pangan di tingkat rumah tangga untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih luas menekankan bahwa ketahanan pangan nasional harus dibangun dari pondasi yang kuat di tingkat rumah tangga. Sedangkan

pengeluaran pangan (pangan dan non pangan) rumah tangga merupakan salah satu indikator ketahanan pangan rumah tangga (Pakpahan, 1993).

2.1.3 Keterjangkauan Pangan

Keterjangkauan pangan atau sering disebut juga akses pangan berdasar Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian Tahun 2020 merupakan kemampuan penduduk dalam mendapatkan kecukupan pangan, bisa diperoleh dari hasil produksi pribadi, barter, pinjaman, pembelian, hadiah serta bantuan pangan ataupun mengkombinasikan semuanya. Keterjangkauan pangan berdasar Badan Ketahanan Pangan Tahun 2020 terdapat tiga indikator, yakni: (i) persentase rumah tangga miskin. Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Rumah tangga miskin cenderung menghadapi kesulitan dalam mengakses pangan yang cukup dan bergizi. Semakin tinggi persentase ini, semakin besar tantangan keterjangkauan pangan di suatu daerah. Kemiskinan langsung mempengaruhi kemampuan membeli makanan. (ii) persentase penduduk dengan pengeluaran ≥ 65 persen untuk pangan. Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka (65% atau lebih) untuk makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka memiliki sedikit sisa pendapatan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan. Pengeluaran tinggi untuk pangan menunjukkan keterbatasan ekonomi. Persentase tinggi menunjukkan rendahnya daya beli dan keterbatasan akses terhadap pangan yang berkualitas. dan (iii) persentase penduduk tanpa akses listrik. Meskipun tidak langsung terkait dengan pangan, akses listrik merupakan indikator penting untuk infrastruktur dan pembangunan. Listrik diperlukan untuk penyimpanan dan pengolahan makanan yang aman. Kurangnya akses listrik dapat menghambat ketahanan pangan rumah tangga dan masyarakat. Akses listrik mencerminkan ketersediaan infrastruktur dasar yang mendukung ketahanan pangan. Penggunaan indikator-indikator ini membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan dan program untuk meningkatkan keterjangkauan pangan di berbagai wilayah Indonesia. Rumah tangga miskin lebih mungkin menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan dan juga lebih mungkin tidak memiliki akses listrik.

Keterjangkauan pangan terkait dengan aksesibilitas perorangan terhadap pangan, baik dari aspek fisik maupun ekonomi, di mana aspek fisik terkait dengan prasarana dan sarana transportasi, sistem distribusi dan logistik pangan, kebijakan pemasaran dan perdagangan pangan; sedangkan aspek ekonomi terkait dengan daya beli perorangan dan rumah tangga yang dicerminkan oleh pendapatan dan sistem kekerabatan dalam mengatasi masalah pangan. Kemiskinan sebenarnya secara teoritis merupakan indikator kunci yang berperan besar dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Dengan tingginya kemiskinan maka akses terhadap pekerjaan dan pengelolaan sumberdaya menjadi rendah dan itu akan menyebabkan rendahnya *income* masyarakat. Rendahnya *income* menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Rendahnya daya beli menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan pangan yang memenuhi pola pangan harapan sebagai syarat asupan gizi yang cukup juga berpeluang besar tidak dapat dipenuhi (Dewan Ketahanan Pangan 2009).

Kriteria penduduk miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 adalah mereka yang memiliki pengeluaran rata-rata per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri terdiri dari dua komponen utama yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 Kkal per kapita per hari. Angka ini menjadi standar kebutuhan kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk dapat hidup sehat dan aktif. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) mencakup kebutuhan minimum untuk aspek-aspek di luar makanan, seperti: perumahan, sandang (pakaian), pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi, seseorang dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran per kapita per bulannya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan. Menurut World Bank (2004), salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin

(*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

Akses pangan atau keterjangkauan pangan masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan pangan sangat ditentukan oleh besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Pengaruh pendapatan terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. Harga komoditas pangan terhadap akses pangan dapat dilihat dari harga pangan yang terjangkau memungkinkan untuk membeli lebih banyak dan beragam bahan makanan. Selanjutnya pangan berpengaruh terhadap aksesibilitas terhadap bahan pangan melalui daya beli (Hanani, 2009).

Menurut Soekirman (1996), mengungkapkan bahwa cukup tidaknya persediaan pangan di pasar berpengaruh pada harga pangan. Kenaikan harga pangan bagi keluarga yang tidak bekerja atau yang bekerja tetapi penghasilannya tidak cukup, dapat mengancam kebutuhan gizinya yang berarti ketahanan pangan keluarganya terancam. Sebaliknya, persediaan cukup, harga stabil tetapi banyak penduduk tanpa kerja dan tanpa pendapatan, berarti tanpa daya beli, juga menyebabkan persediaan pangan itu tidak efektif. Karena itu pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) akan mengatur keseimbangan dan keserasian antara kebijaksanaan sistem pangan (produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi) dan kebijaksanaan di bidang sosial seperti penanggulangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, gizi dan lain-lain. Menurut Badan Pusat Statistik rokok dimasukkan dalam pengeluaran pangan karena di Indonesia, rokok sering dianggap sebagai bagian dari konsumsi sehari-hari, mirip dengan makanan atau minuman. Sedangkan menurut Ilmu Gizi dan Undang-undang Pangan Tahun 2012 rokok dimasukkan dalam konsumsi non pangan karena rokok tidak memiliki nilai gizi dan tidak berkontribusi pada asupan nutrisi.

Aset produksi merupakan aset yang sangat berharga sebagai sumber pendapatan berkelanjutan bagi keluarga. Oleh karena itu, ketika rumah tangga menerapkan strategi koping dengan menjual aset yang dimilikinya, hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga semakin terancam. Secara umum, rumah tangga dengan akses yang tidak memadai terhadap pangan tidak memiliki aset yang baik, dan ketiga akses penghubung yakni kurangnya akses

terhadap infrastruktur, juga menyebabkan kemiskinan ketika masyarakat tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang rendah kurang memiliki kesempatan ekonomi dan layanan yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih belum mampu mengakses program pembangunan pemerintah. Investasi di bidang infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara, dll.), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan, dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Hanafie (2010), terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan ketahanan pangan, yaitu mendorong peningkatan daya beli masyarakat miskin dengan cara menaikkan tingkat produksi pangan secara simultan dan pendistribusian kembali *supply* pangan untuk wilayah kurang pangan menggunakan sistem yang bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan menaikkan insentif untuk meningkatkan produksi pangan dalam jangka panjang. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Kementerian Pertanian (2015) yang menyatakan bahwa terdapat lima strategi utama dalam mencapai peningkatan ketahanan pangan, antara lain: (1) memprioritaskan pembangunan ekonomi dibidang pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan produksi pangan domestik, menyediakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penghasilan masyarakat, (2) penyediaan pangan untuk masyarakat yang tergolong miskin dan masyarakat yang terdampak bencana alam maupun sosial, (3) pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk pemenuhan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA), (4) melakukan sosialisasi dan edukasi untuk memanfaatkan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dari sumber daya alam lokal kepada masyarakat, (5) penanggulangan keamanan pangan segar.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Diantara penelitian tersebut terdapat persamaan namun juga perbedaan. Rincian persamaan dan perbedaan diantara penelitian terdahulu dimaksud disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Judul/Penulis/Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Terhadap Kerawanan Pangan di Kabupaten Jombang Tahun 2015/Wulandari Mei /2016	Menghasilkan peta persebaran yang termasuk dalam kategori tahan pangan dengan parameter tingkat ketahanan pangan.	Menganalisis penduduk hidup dibawah garis kemiskinan dan rumah tangga tanpa akses listrik. Menggunakan metode analisis statistik.	Tidak menganalisis proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap pengeluaran total. Analisis data menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi Geografi).
2	Hubungan Pendapatan, Total Pengeluaran, Proporsi Pengeluaran Pangan dengan Status Ketahanan Rumah Tangga Petani Gurem/Amalia dan Mahmudiono/2017	Semua variabel yakni pendapatan, total pengeluaran, dan proporsi pangan berhubungan dengan tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani gurem.	Menganalisis tingkat ketahanan pangan rumah tangga menurut akses ekonomi yang terdiri dari pendapatan, total pengeluaran, dan proporsi pengeluaran pangan.	Tidak mengangkat topik rumah tangga dibawah garis kemiskinan dan rumah tangga tanpa akses listrik. Menggunakan uji spearman dan uji chi square.
3	Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Pedesaan di Kabupaten Kudus/Iin Endya Hannavi/2018	Besarnya rata-rata proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total adalah 56,4%, artinya pengeluaran konsumsi pangan masih mengambil bagian besar dari total pengeluaran rumah tangga pedesaan.	Menganalisis tingkat ketahanan menurut proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga pedesaan. Metode yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.	Tidak menganalisis rumah tangga dibawah garis kemiskinan dan Tidak menganalisis rumah tangga tanpa akses listrik. Menggunakan uji f dan uji t.
4	Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Anggota Lumbung di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu/Marita Infia Fitriani/2019	Ketahanan pangan menurut kategori BPS sebanyak 22,73 persen kategori tahan pangan, 15,91 persen	Menganalisis tingkat ketahanan rumah tangga berdasarkan pengeluaran pangan.	Tidak mengangkat topik keterjangkauan pangan. Menganalisis faktor yang

No	Judul/Penulis/Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		kurang pangan, 34,09 persen rentan pangan, dan 27,27 persen rawan pangan.	Menggunakan data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.	mempengaruhi tingkat ketahanan pangan dianalisis dengan ordinal logit.
5	Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Terhadap Kerawanan Pangan di Kabupaten Indragiri Hilir Rujiah/2020	Rumah tangga dengan pengeluaran > 65% terdapat 2 kecamatan, sedangkan yang dibawah < 65% terdapat 16 kecamatan. Indeks penduduk tanpa listrik Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 0,87. Kondisi relatif antar kecamatan menunjukkan dalam kondisi sangat rawan. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif kecil. Kondisi relatif antar kecamatan dari sangat rawan pangan sampai sangat tahan pangan.	Menganalisis tingkat ketahanan pangan berdasarkan indikator keterjangkauan pangan dengan menganalisis penduduk dibawah garis kemiskinan dan rumah tangga tanpa akses listrik. Menggunakan analisis deskriptif dan analisis spasial.	Tidak menganalisis proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap pengeluaran total. Menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi Geografi) dan analisis SWOT.
6	Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros/Ida Andriani /2021	Tingkat kesejahteraan atau ketahanan pangan rumah tangga petani di Kecamatan Maros masih rendah atau rentan. Tingginya proporsi pengeluaran pangan terhadap total biaya rumah tangga petani sebelum dan selama pandemi Covid-19 lebih tinggi, sehingga terjadi peningkatan	Menganalisis proporsi konsumsi pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran. Menggunakan deskriptif analitis.	Tidak menganalisis rumah tangga dibawah garis kemiskinan dan rumah tangga tanpa akses listrik.

No	Judul/Penulis/Tahun	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		jumlah dan tingkat konsumsi pangan yang tergolong defisit.		
7	Analisis Ketahanan Pangan di Kota Pekanbaru/Rega Desvaeryand /2022	Berdasarkan aspek akses pangan, Kota Pekanbaru berada dalam kondisi tahan pangan. Nilai indeks komposit ketahanan pangannya sebesar 0,32.	Menganalisis keterjangkauan pangan rumah tangga dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.	Tidak menganalisis indikator keterjangkauan proporsi pengeluaran pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran. Menggunakan metode studi kepustakaan.
8	Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus Kabupaten Subang)/Dody Budhy Sutrisno /2023	Akses ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan. Artinya jika kabupaten subang ingin meningkatkan ketahanan pangan rumah tangganya maka akses ekonomi seperti daya beli masyarakat terhadap pangan, jumlah anggota keluarga yang bekerja, dan tingkat ekonomi wilayah harus ditingkatkan.	Menganalisis keterjangkauan terhadap ketahanan pangan dari aspek ekonomi. Menggunakan pendekatan kuantitatif.	Tidak menganalisis indikator rumah tangga dibawah garis kemiskinan, proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total, dan rumah tangga tanpa akses listrik. Menggunakan analisis Partial Least Square (PLS) SEM.

2.3 Pendekatan Masalah

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di latar belakang, Kecamatan Pagerageung teraliri oleh DAS Citanduy, dan DAS Citanduy merupakan salah satu daerah aliran sungai di Jawa Barat yang kondisinya kritis (Irawan et al., 2020). Lahan kritis merupakan salah satu permasalahan utama dari sekian banyak permasalahan yang ada, karena dapat menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan sungai, terutama pada muaranya. Salah satu faktor penyebab lahan kritis adalah erosi yang disebabkan oleh laju air larian (*surface ran-off*) sebagai kurangnya penutup lahan (*land coper*) dari pemanfaatan lahan di Desa Nanggewer. Selain itu,

erosi juga disebabkan oleh beberapa faktor alam, seperti curah hujan, jenis tanah, formasi geologi, iklim, jenis tanah, topografi. Oleh karena itu, pengelolaan DAS diperlukan untuk mencari solusi terhadap permasalahan erosi dan perluasan daerah kritis di bagian hulu sungai (Hardjasoemantri, 1986; Suripin, 2002). Hingga saat ini, sebagian besar air irigasi berasal dari DAS Citanduy, tempat dibangunnya bendungan Lewikeris di Jawa Barat, Perlunya analisis keterjangkauan pangan berdasarkan tingkat ketahanan pangan sebagai indikator kesejahteraan rumah tangga petani di Desa Nanggewer.

Ekosistem DAS terbagi menjadi tiga bagian yaitu DAS atas (daerah hulu), DAS tengah, dan DAS bawah (daerah hilir) yang masing-masing bagiannya saling mempengaruhi. DAS Citanduy mempunyai kondisi lahan kritis dan merupakan DAS prioritas. Dengan kondisi DAS Citanduy berada pada daerah prioritas maka yang hidup dilingkungan tersebut dituntut untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan secara berkelanjutan. Dikarenakan banyak yang memanfaatkan sumber air di DAS Citanduy mulai dari hulu hingga hilir.

Berfungsinya daerah aliran sungai (DAS) sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia mengendalikan keterkaitan antara potensi sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta seluruh aktivitasnya, dengan tujuan untuk mendorong keberlanjutan, keharmonisan ekologi, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) perlu dilakukan sebagai upaya keseimbangan. Jika ingin menyelesaikan permasalahan DAS Citanduy, maka sangat dibutuhkan peran dukungan masyarakat lokal untuk memanfaatkan kawasan tersebut secara seimbang. Masyarakat Desa Nanggewer sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan tujuan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup dan menghindari kerusakan kondisi lingkungan yang berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan potensi sumber daya alam dan lingkungan alam harus dioptimalkan.

Pangan merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup, termasuk manusia, yang harus tersedia baik dalam jumlah maupun kualitas, aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli. Kekurangan pangan tidak hanya menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, bahkan dapat mengancam keamanan sosial. Permasalahan pangan menjadi semakin penting bila dikaitkan dengan hak asasi manusia.

Pemenuhan pangan bagi manusia sangatlah penting. Sebab, permasalahan ini selalu erat kaitannya dengan hak asasi manusia, yaitu kehidupan yang layak (sejahtera), termasuk kehidupan yang baik jasmani dan rohani (hanani, 2008). Ketika kerawanan pangan terjadi karena pemerintah tidak menyediakan pangan kepada individu, maka hal tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan ketahanan pangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015) menyatakan bahwa ketahanan pangan dalam pembangunan nasional berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia melalui penyediaan pelayanan yang adil dan merata, berdasarkan kemandirian dan sesuai dengan keyakinan.

Rachman dan Ariani (2002) mengemukakan bahwa ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional dan daerah merupakan prasyarat untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Namun, ini tidak cukup. Syarat kecukupan pasokan adalah terpenuhinya kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga/individu. Menurut FAO (1997), ketahanan pangan adalah suatu keadaan dimana setiap rumah tangga mempunyai akses fisik dan ekonomi terhadap pangan bagi seluruh keluarganya dan rumah tangga tersebut tidak berisiko kehilangan kedua jalur akses tersebut. Artinya konsep ketahanan pangan mencakup akses terhadap pangan primer.

Salah satu indikator ketahanan pangan adalah keterjangkauan pangan di Desa Nanggewer. Keterjangkauan pangan, yang identik dengan daya beli, menjadi perhatian utama rumah tangga petani karena sebagian besar rumah tangga petani mengonsumsi makanan dan non-makanan sebagai kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan keterjangkauan pangan oleh rumah tangga petani berasal dari output yaitu usahatani yang dijual dan untuk konsumsi sehari-hari.

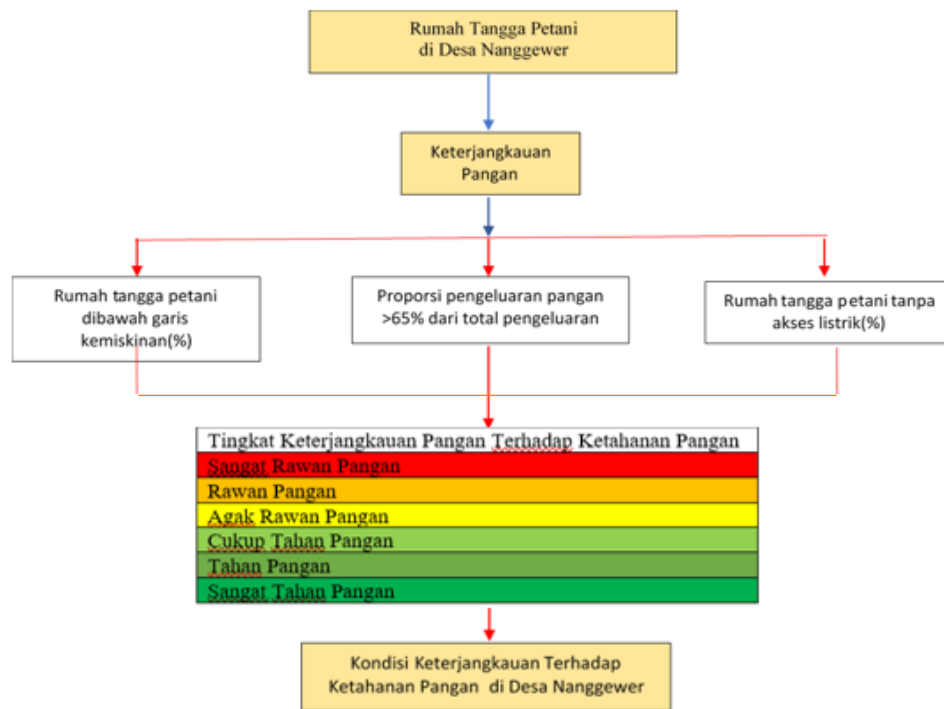
Keterjangkauan terhadap pangan merupakan elemen penting dalam konsep ketahanan pangan. Namun hal ini tidak berarti bahwa ketahanan pangan dapat terjamin karena ketersediaan pangan setiap rumah tangga berbeda-beda. Salah satu aspek pangan adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi menyangkut harga pangan dan non-pangan. Harga pangan mempengaruhi daya beli rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan individu. Akses ekonomi terhadap pangan ditentukan oleh pendapatan, kesempatan kerja, dan harga. Dalam penelitian ini, akses ekonomi berfokus pada dimensi pendapatan.

Namun untuk mencapai ketahanan pangan dari sisi keterjangkauan pangan bagi rumah tangga petani di Desa Nanggewer, perlu diketahui persentase rumah tangga petani yang berada di bawah garis kemiskinan di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung, persentase pengeluaran pangan lebih dari 65% total pengeluaran rumah tangga petani di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung, dan persentase rumah tangga petani tanpa akses listrik di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung. Agar tercapainya ketahanan pangan dalam jangka pendek, yaitu kemampuan mengelola dan memanfaatkan lingkungan setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan jangka panjang, yaitu mengurangi bencana alam tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan untuk meminimalisir tingkat erosi.

Meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan. Tingkat ketahanan pangan dapat diukur dari kemiskinan. Ketika memiliki penghasilan terbatas, dan mendahulukan pemenuhan untuk makanan sehingga mempengaruhi jumlah makanan yang dikonsumsi. Ketika pendapatan berubah dan meningkat, proporsi pengeluaran untuk makanan menurun dan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan meningkat. Sisa pendapatan selain digunakan untuk makanan dan non-makanan, digunakan untuk tabungan dan investasi. Namun, kelompok rumah tangga petani yang berpendapatan rendah cenderung tidak menabung karena sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Begitupun dengan adanya listrik dapat mendukung kegiatan ekonomi lokal. Kehadiran listrik mempengaruhi dinamika perekonomian suatu wilayah, sehingga ketika rumah tangga mempunyai akses terhadap listrik maka dinamika perekonomian suatu wilayah meningkat. Peluang untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja melalui akses terhadap listrik. Kesejahteraan diukur dari ketersediaan listrik, sehingga yang tidak mempunyai akses terhadap listrik menjadi salah satu indikatornya.

Alur kerangka pendekatan masalah tingkat keterjangkauan terhadap ketahanan pangan di Desa Nanggewer Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pendekatan Masalah